

Lagi Lagi Minyak Tanah

Ibrahim Hasyim

Mantan Direktur Pertamina

Di negeri ini terjadi lagi kekurangan pasokan minyak tanah pada beberapa wilayah. Analisis penyebabnya masih berkuat

ada alasan klasik dari sisi suplai (*supply side management*), sehingga dengan sendirinya solusi masalah tersebut sama klasiknya yaitu melalui operasi pasar minyak tanah. Itulah tindakan jangka pendek tambal sulam yang bisa dilakukan pemerintah, dan kalau hanya dengan cara itu dipastikan kelangkaan secara berkala akan berulang lagi.

Sesungguhnya ada penyebab lain yang mendasar dan struktural sifatnya yang perlu diselesaikan dengan tuntas, sehingga terdapat keseimbangan dalam *supply demand* energi di sektor rumah tangga dan di sektor informal.

Minyak tanah di Indonesia telah membuat sejarah menarik sejak dijadikan bahan bakar tersebut sebagai instrumen politik untuk pemerataan di jaman Orde Baru pada dekade 70-an. Kebijakan tersebut memang didukung dan efektif karena pada masa itu Indonesia mengalami *oil boom*. Akhirnya minyak tanah dijadikan salah satu unsur bahan pokok rakyat yang harus diurus seperti mengurus beras misalnya. Infrastruktur distribusi dan pemasaran dibangun di seluruh pelosok tanah air. Minyak tanah mengalir deras dan merusak tatanan infrastruktur energi masyarakat yang telah ada sebelumnya, terutama di pedesaan.

Menggunakan minyak tanah menjadi simbol tingkat kesejahteraan rakyat. Masyarakat pun beramai-ramai memakai minyak tanah untuk masak dan penerangan sampai akhirnya minyak tanah dianggap sebagai hak dan Pemerintah wajib memenuhinya. Eksesnya kemudian masuk dalam budget Negara, volume minyak tanah selalu menjadi *driver* besarnya subsidi BBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dimulai sejak tahun 1975/76 sebesar Rp 1,3 miliar kemudian meningkat terus menca-

Semakin besar volume minyak tanah makin besar pula besaran subsidi yang harus disediakan. Itulah sebabnya Pemerintah menekan volume minyak tanah antara lain dengan menjadikan Lpg sebagai energi substitusi untuk kebutuhan memasak di rumah tangga perkotaan yang sampai saat ini masih terkendala pada penyediaan tabung Lpg 3 kg. Lalu bagaimana dengan rumah tangga di pedesaan dan di sektor informal. Jenis energi apa yang disiapkan? **Kondisi lokal**

Terjadinya kekurangan pasokan minyak tanah di beberapa daerah belum tentu sama penyebabnya. Kekurangan pasokan di Jakarta tidak sama penyebabnya dengan yang terjadi di Binjai atau yang terjadi di Pantura Jawa. Penyebabnya akan sangat terkait dengan dinamika kehidupan masyarakat di masing-masing daerah. Kekurangan pasokan di wilayah pantura Jawa dan wilayah pesisir lain misalnya, pasti akan terkait dengan dinamika kegiatan masyarakat nelayan di sana. Minyak tanah sangat luas dipakai untuk bahan bakar kapal nelayan dan ini adalah suatu keniscayaan. Tidak bisa berdebat lagi itu ilegal jadi harus dimasukkan dalam perkiraan kebutuhan.

Begitu pula di kota besar seperti Jakarta, cobalah lihat bagaimana ribuan *warteg* di belakang gedung-gedung tinggi minum minyak tanah, apalagi kebutuhan Usaha Kecil dan Menengah di pinggiran kota.

Sebentar lagi musim haji akan tiba, berarti banyak kenduri melepas calon haji yang dilakukan masyarakat, mau tidak mau akan

Pengurangan pasokan volume minyak tanah akan gagal bilamana tidak dikoordinasikan dengan manajemen di sisi permintaan.

meningkatkan konsumsi minyak

Penulis pernah melihat bagaimana *Cosmo Oil Coy* di Jepang menghitung jumlah kebutuhan minyak tanah tiap minggu, puluhan variabel kegiatan masyarakat dan kondisi alam dimasukkan dalam formula seperti perubahan suhu. Sensitivitas konsumsi minyak tanah selalu berkorelasi dengan denyut kehidupan masyarakat yang berbeda setiap waktu dan wilayah. Kondisi seperti itu harus mampu ditampung dalam model atau formula perhitungan kebutuhan minyak tanah.

Kalaupun perhitungan konsumsi perkapita yang kita gunakan saat ini sebagai pendekatan, maka pada implementasi jабaran *quota* ke daerah haruslah secara akurat memperhatikan variabel kondisi lokal yang berbeda di tiap wilayah. Penulis melihat alasan seperti ini termasuk penyebab kelangkaan minyak tanah yang terjadi tidak merata akhir-akhir ini di beberapa daerah.

Demand Side

Penyebab lain kelangkaan adalah karena adanya penerapan kebijakan menekan pemakaian minyak tanah. Angkanya dapat jelas dilihat dari angka rencana pemakaian minyak tanah pada APBN Perubahan tahun 2006, yang besarnya telah menurun sebesar 16% dibandingkan dengan rata2 realisasi konsumsi perbulan di tahun 2004, sekalipun jumlah penduduk dan jumlah UKM bertambah.

Ada dua hal yang bisa menjadi pemicu kelangkaan dengan kebijakan konservasi tersebut, disamping karena sensitivitas variabel lokal seperti diuraikan diatas, bisa juga karena hukum *limit of growth* yang tidak terdeteksi, padahal disana sudah tidak ada lagi ruangan untuk pengurangan volume di satu wilayah. Kalau masih dikurangi juga *quota* nya pasti akan terjadi kelangkaan.

Yang menarik adalah adanya perubahan sikap masyarakat akibat dari kelangkaan kelangkaan yang terjadi. Penerapan kebijakan mengurangi volume minyak tanah sejauh ini telah disikapi masyarakat dengan caranya masing-masing. Di kota dengan sikap mengantri tunggu mobil operasi pasar, tapi di pedesaan dengan inisiatif beralih pada menggunakan bahan bakar lain yang tersedia di sekelilingnya. Sikap seperti ini sesungguhnya secara potensial telah memberi peluang penerapan kebijakan pengurangan pasokan.

pun pelan-pelan berkembang. Mereka tidak lagi menuntut minyak tanah sebagai hak.

Hal ini momentum yang bagus untuk melakukan *demand side management* secara agresif dan sinergis. Kayu bakar ataupun energi biomassa banyak tersedia di pedesaan. Pengadaan energi di pedesaan akan lebih efektif penanganannya karena tidak memerlukan modal besar dan teknologi tinggi dan karena itu seharusnya lebih menjadi prioritas dibanding program Lpg 3 kg. Pengembangan dan pemakaian energi alternatif pedesaan akan lebih mendapatkan *maximum net benefit* bagi masyarakat luas, dan sekaligus dapat mengurangi kemiskinan di pedesaan.

Demand side management yang perlu segera diterapkan adalah diversifikasi energi dengan mengembangkan aneka ragam sumber energi biomassa tanpa perlu bergantung pada satu jenis saja, penyediaan dan penggunaan alat dan teknologi, penetapan standar, peraturan dan penyuluhan serta kebijakan indeksasi yang menunjukkan manfaat jenis energi tertentu untuk pemakaian tertentu.

Program ini dapat saja menjadi *extension* dari program *biofuel* Pemerintah yang dikhususkan untuk penyediaan energi substitusi minyak tanah di pedesaan dan sektor informal ataupun perluasan dari program Lpg 3 kg di perkotaan.

Penerapan manajemen di sisi suplai berupa pengurangan volume minyak tanah akan bisa terus gagal bilamana tidak dikembangkan dan dikoordinasikan dengan manajemen di sisi permintaan pada tiap wilayah karena tingkat keberhasilannya bisa berbeda satu dengan lainnya.

Kelangkaan akan terus terjadi jika pemerintah tidak menciptakan keseimbangan di sisi pasokan dengan sisi permintaan. Sayangnya intervensi di sisi permintaan masih sporadis karena lebih merupakan hasil inisiatif masyarakat sendiri dan tanpa ada insentif apa-apa sebagai *trade off* dari peran pemerintah menekan konsumsi minyak tanah. □